

User name:
Ariyan Alfraita

Check ID:
36548453

Check date:
21.01.2021 15:06:48 WIB

Check type:
Doc vs Internet

Report date:
21.01.2021 15:08:46 WIB

User ID:
110003

File name: **Artikel Pak Andhi**

Page count: **6** Word count: **2780** Character count: **22483** File size: **26.54 KB** File ID: **46950712**

7.12% Matches

Highest match: **3.45%** with Internet source (<http://staff.unila.ac.id/artefaksi/files/2015/06/ipi73037.pdf>)

7.12% Internet sources 18

Page 8

No Library search was conducted

0% Quotes

Exclusion of quotes is off

Exclusion of references is off

0% Exclusions

No exclusions

IMPLEMENTASI APLIKASI LAYANAN CEPAT ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (LAPAK) DESA AMBULU KECAMATAN SUMBERASIH KABUPATEN PROBOLINGGO

Andhi Nur Rahmadi

Universitas Panca Marga Probolinggo
andhi.iansyah@upm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan dari penerapan aplikasi Layanan Cepat Administrasi Kependudukan (LAPAK) guna menunjang optimalisasi pelayanan publik di Desa Ambulu Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud menggambarkan atau memaparkan situasi atau kejadian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi LAPAK guna menunjang optimalisasi pelayanan publik di Desa Ambulu Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo belum dapat dikatakan berhasil. Hal tersebut dikarenakan antara lain ialah pertama, masyarakat kurang paham terkait dilaksanakannya inovasi LAPAK ini. Kedua, kurangnya persiapan SDM sebagai penunjang keberhasilan suatu pelaksanaan inovasi yang hanya ditangani oleh 2 staf. Ketiga, segi infrastruktur penunjang keberhasilan pelaksanaan inovasi LAPAK ini sudah memadai tetapi masih ada kendala ketika terjadi pemadaman listrik sehingga pelayanan tidak berjalan dengan baik. Terakhir keempat, untuk hal dukungan pemerintah dalam bentuk anggaran sudah menjadi prioritas utama dalam pengembangan penerapan.

Kata Kunci : Inovasi, Pelayanan, LAPAK

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi sebagai bagian dari globalisasi tidak terpisahkan dari masyarakat modern seperti keadaan saat ini yang telah membawa tuntunan yang besar bagi masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyedia layanan untuk lebih bersifat terbuka, lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas ke pemerintahannya, dan juga memberikan kemudahan terhadap akses informasi khususnya informasi tentang pemerintahan. Sehingga dapat mendorong instansi pemerintah untuk melaksanakan sebuah konsep tata pemerintahan baik yang lazim disebut dengan *good governance*.

Kaitannya dalam perwujudan pelayanan publik yang *good governance* pemerintah dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tidak tertinggal. *E-government* merupakan penggunaan dan pemanfaatan informasi oleh pemerintah agar tercipta komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dunia bisnis dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk memberikan

pelayanan secara cepat dan tepat. Pemerintah telah mengeluarkan Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Tujuan pengembangan *E-Government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *e-Government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

E-Government sebagai konsep pelayanan yang menggunakan teknologi informasi dapat dibagi dalam beberapa tingkatan yaitu pertama, persiapan; kedua, pematangan; ketiga, pemantapan; dan keempat, pemanfaatan. Pengaplikasian sistem *e-government* diharapkan mampu untuk mengupgrade sistem pemerintahan berjalan menuju ke arah yang semakin efisien, efektif, transparan, dan akuntabilitas. Pengertian *e-government* menurut Kementerian Kominfo yaitu sebagai aplikasi

teknologi informasi yang berbasis internet dan perangkat digital lainnya yang dikelola oleh pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat, mitra bisnis, pegawai, badan usaha dan lembaga-lembaga lainnya secara online.

Desa Ambulu merupakan desa yang berada di kecamatan Sumberasih yang ada dibagian Kabupaten Probolinggo. Desa Ambulu Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo baru – baru ini mengeluarkan suatu inovasi baru yaitu aplikasi LAPAK. Layanan Aplikasi Lapak ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan pelayanan administrasi yang berkualitas, cepat, singkat, aman, modern, akuntabel, dan menguntungkan bagi masyarakat.

Dengan adanya layanan Lapak ini, masyarakat bisa mengurus atau melengkapi surat-surat administratif tanpa hadir ke kantor desa dan kantor kecamatan. Karena semuanya tersambung dan terkoneksi secara online. Layanan Lapak ini sangat efektif, sehingga mempercepat serta mempersingkat waktu pelayanan publik administrasi serta tidak menyulitkan masyarakat dan juga tanpa menyita waktu masyarakat yang sedang melaksanakan aktifitas sehari-hari. Hanya butuh waktu sekitar 10 menit pelayanan sudah bisa diselesaikan.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana penerapan aplikasi LAPAK guna menunjang optimalisasi pelayanan publik di Desa Ambulu Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo ?

3. MANFAAT PENELITIAN

Diharapkan penelitian ini dapat memperluas pemahaman ilmiah mengenai LAPAK di Desa Ambulu Kabupaten Probolinggo, dan harapan kedepan agar tercipta inovasi di masing-masing desa dalam menunjang pelayanan publik.

4. TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan sebagaimana dikatakan oleh Grindle bahwa :“sesungguhnya tidak semata – mata terbatas pada mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke

dalam prosedur rutin melalui saluran birokrasi, tetapi terkait dengan masalah konflik, yaitu siapa memperoleh apa dalam suatu kebijakan, bahkan pelaksanaan kebijakan merupakan sesuatu yang sangat penting, bahkan kemungkinan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan”. Suatu kebijakan jika tidak segera diimplementasikan, tidak akan dapat diketahui tingkat keberhasilannya untuk orang banyak. Sehingga kebijakan hanya akan menjadi rencana bagus yang akan tersimpan rapi dalam tumpukan arsip-arsip lainnya(Sudiyono, 2007:80).

Inovasi Pelayanan Publik

Menurut Rogers (dalam Rina 2013) inovasi adalah sebuah ide, praktik atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya. Inovasi menurut Asian Development Bank adalah sesuatu yang baru, dapat diimplementasikan, dan memiliki dampak yang menguntungkan. Inovasi baru sebuah kejadian ataupun aktivitas; ini adalah konsep, proses, penerapan, dan kapabilitas yang menentukan kesuksesan organisasi. Inovasi dapat membantu sektor publik untuk membuat nilai untuk masyarakat.

Sedangkan inovasi dalam Penerapan dan Reformasi Birokrasi No. 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik serta Kebutuhan Inovasi LAN adalah proses kreatif penciptaan pengetahuan dalam melakukan penemuan baru yang berbeda dan/atau modifikasi dari yang sudah ada.

Pelayanan Publik

Menurut Kurniawan (dalam Sinambela:2006:5) pelayanan publik diartikan sebagai pemberi pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang diterapkan. Pengertian pelayanan umum menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-PAN) Nomor 81 Tahun 1993 adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat di daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara / Daerah dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e-Government

Dalam bukunya yang berjudul *Membangun Aplikasi electronic government (e-Government)*. Indrajit (2002:3), menyebutkan berbagai definisi *e-government* dikemukakan baik oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah. *The World Bank Group* mendefinisikan *e-government* berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti *wide area network*, *Internet* dan *mobile computing*) oleh organisasi pemerintahan yang mempunyai kemampuan membentuk hubungan dengan Warga Negara, bisnis dan organisasi lain dalam pemerintahan.

Tanpa mengesalkan arti dari beragam definisi yang telah disampaikan diatas setidaknya ada tiga kesamaan karakteristik dari setiap definisi *e-government*, yaitu : Pertama, merupakan suatu mekanisme interaksi baru (*modern*) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (*stakeholder*). Kedua, melibatkan penggunaan teknologi informasi terutama internet. Ketiga, tujuan yang akan dicapai adalah memperbaiki mutu dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

a. Aspek Penting Penunjang Keberhasilan e-Government

Saat ini di berbagai instansi pemerintahan di seluruh Indonesia rata-rata telah menerapkan sistem *e-government* sesuai dengan Inpres. No. 3 Tahun 2003 tentang Strategi dan Pengembangan Nasional *e-Government* di Indonesia sebagai berikut :

1. Kesiapan Sumberdaya Alam (SDM)

Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia khususnya aparat pemerintah dilakukan dengan meningkatkan kemampuan aparat pemerintah secara terus menerus. Aparatur pemerintah baik sebagai pengembang, pengelola maupun pengguna *e-government* merupakan faktor yang turut menentukan bahkan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan dan pengembangan *e-government*.

2. Partisipasi

Partisipasi yang diterapkan pada setiap negara berbeda-beda sesuai dengan konteks dan jenis demokrasi yang dianut. Pada umumnya negara menganut sistem perwakilan. Demokrasi dalam sistem perwakilan menekankan pada komunikasi atau interaksi antar masyarakat, pemerintah dan pegawai pemerintahan dan meningkatkan kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan sesuai dengan aspirasi masing-masing

(Antiroiko,2004:42). Disini terlihat hal yang penting dalam proses demokrasi adalah partisipasi termasuk komunikasi. Komunikasi berarti ada aliran informasi antar aktor yang terlibat.

3. Ketersediaan dan Konsisten Anggaran (Dukungan Pemerintah)

Ketersediaan dan konsistensi anggaran ini merupakan dukungan yang besar untuk dapat mengembangkan *e-government* yang sudah diterapkan. Oleh karena itu dukungan pemerintah menduduki peran yang sangat penting jika dukungan pemerintah tidak diberikan maka dipastikan *e-government* juga tidak akan berjalan dengan mulus. Walaupun penggunaan teknologi informasi tidak harus analog dengan kebutuhan dana yang tinggi namun dalam perencanaan kebutuhan dalam anggaran cenderung masih terbatas.

Keterbatasan pendanaan dalam penerapan *e-government* ini bisa berpengaruh pada masih rendahnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi sehingga pada kondisi ini pemerintah harus senantiasa berstrategi dalam membangun jaringan *e-government* luas walaupun pendanaan terbatas. (Muliarta, Metro Bali, 2012).

4. Keamanan

Pada perkembangan terkini, seringkali penerapan *e-government* atas keamanan data seringkali terabaikan. Padahal jika diperhatikan dampak kebocoran data akan berdampak sangat buruk terutama menyangkut dokumen birokrasi. Kebocoran data apalagi jika data tersebut bersifat sangat rahasia maka akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja data program samsat online yang jika mengalami kebocoran maka data pemilik dan data-data kendaraan dapat disalahgunakan oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab.

Menurut (Budi, 2006) teknologi jaringan computer sangat dibutuhkan oleh organisasi dalam membangun sistem informasi secara terintegrasi karena sistem jaringan *computer* memberikan perlindungan terhadap data. Jaminan keamanan data tersebut diberikan melalui pengaturan hak akses para pemakai dan *password*, serta teknik perlindungan terhadap hard disk sehingga data akan mendapatkan perlindungan yang efektif. Artinya ialah bahwa dengan membangun sistem jaringan computer dengan sistem informasi secara terintegrasi maka dapat melindungi data-data yang tersimpan di internet sehingga dapat menjaga keberhasilan data-datanya.

5. Infrastruktur

Esensi dasar yang telah dibentuk oleh pemerintah *e-government* adalah memfasilitasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam program pemerintahan yang rutin. Heeks (dalam Nurhadryani, 2009) mempersyaratkan bahwa kesiapan menuju keberhasilan *e-government* berkaitan dengan beragam faktor infrastruktur di dalamnya seperti, infrastruktur sistem data, infrastruktur legal/hukum, infrastruktur kelembagaan, infrastruktur SDM, infrastruktur teknologi, dan kepemimpinan serta pemikiran strategis.

Yang terpenting adalah infrastruktur SDM dimana dalam sistem kepegawaian di daerah bisa menyediakan sumber daya pemerintah yang unggul dalam bidang *ICT*, karena pada beberapa daerah kondisi ini justru menjadi hambatan yang masih sulit terpecahkan. Kemudian infrastruktur teknologi, meski teknologi yang diperlukan relative mahal, namun peluang kerjasama dengan swasta perlu dikembangkan dalam membangun infrastruktur teknologi untuk mendukung *e-government*.

5. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2009:21) mendefinisikan penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang luas.

Dalam penelitian ini yang berjudul Penerapan Aplikasi LAPAK Desa Ambulu Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, maka penelitian ini menggambarkan sejauh mana keberhasilan dari penerapan maupun pelaksanaan aplikasi LAPAK dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan tersebut.

6. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Aplikasi LAPAK Guna Menunjang Optimalisasi Pelayanan Publik di Desa Ambulu Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dimaksudkan untuk mengetahui serta mendiskripsikan keberhasilan dari penerapan Aplikasi LAPAK di Desa Ambulu Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dalam pemberian pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dalam pengurusan surat – surat terkait kependudukan dalam proses

penerapan aplikasi LAPAK. Pelayanan yang diberikan maupun diperoleh tidak lagi secara manual tetapi dengan elektronik dengan menggunakan komputer serta internet didalamnya. Jadi sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya dengan indikator yang akan diteliti dalam penelitian ini ialah sesuai dengan aspek penting penunjang keberhasilan *e-government* yaitu; partisipasi, sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, dan dukungan pemerintah.

1. Partisipasi

Electronic government (e-government) sudah diterapkan pula di Desa Ambulu Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo. Aspek terpenting dari perkembangan *e-government* adalah banyaknya sektor yang terlibat dan saling berinteraksi yang bertujuan untuk meningkatkan proses pembuatan kebijakan dengan cara meningkatkan kesempatan partisipasi. Partisipasi dari masyarakat sangat diharapkan dalam penerapan aplikasi LAPAK. Partisipasi yang dilakukan masyarakat dimaksudkan untuk mengetahui manfaat yang diperoleh masyarakat serta sejauh mana keberhasilan dari penerapan aplikasi LAPAK tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penerapan aplikasi LAPAK pada Desa Ambulu Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dalam pemberian pelayanan dalam mengenai partisipasi masyarakat sudah terbilang baik. Meskipun masih ada masyarakat Desa yang belum paham akan inovasi aplikasi LAPAK tersebut. Aplikasi LAPAK ini yang menjalankan yaitu staf pelayanan yang mengurus aplikasi LAPAK. Disini masyarakat hanya diarahkan untuk membawa persyaratan terkait yang dibutuhkan untuk administrasi kependudukan. Tetapi disini pihak staf pelayanan tetap memberikan pengertian terkait diadakannya aplikasi LAPAK ini kepada masyarakat yang belum paham.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah baik sebagai pengembang, pengelola maupun pengguna Aplikasi LAPAK merupakan faktor yang turut menentukan bahkan kunci keberhasilan pelaksanaan dan pengembangan Aplikasi LAPAK. Untuk itu, perlu upaya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan

penataan dalam pendayagunaan, dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan, serta pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penerapan Aplikasi LAPAK di Desa Ambulu Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dalam pemberian pelayanan mengenai sumberdaya manusia masih terlihat kurangnya persiapan sumberdaya manusia yang mengelola Aplikasi LAPAK tersebut. Hal tersebut terlihat hanya ditangani ada 2 staf yang melayani administrasi kependudukan dengan menggunakan Aplikasi LAPAK. Sehingga masih terlihat masyarakat antri pada saat melakukan pelayanan administrasi kependudukan. Disini untuk melakukan pelayanan administrasi tidak hanya bisa dilakukan di kantor desa saja dirumah staf pelayanan juga bisa dilakukan pelayanan administrasi kependudukan. Staf pelayanan yang menjalankan aplikasi LAPAK tersebut sudah mendapatkan pengajaran dan sudah melakukan bimtek sebagai penguatan untuk melaksanakan suatu inovasi pelayanan tersebut.

3. Infrastruktur

Esensi dasar yangtelah dibentuk oleh pemerintah pada Aplikasi LAPAK adalah memfasilitasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam program pemerintahan yang rutin, partisipasi masyarakat secara elektronik dalam proses pembuatan kebijakan (missal melalui *online* forum, *electronic town hall meeting*). Kesiapan menuju keberhasilan *e-governmen* berkaitan dengan beragam faktor infrastruktur.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penerapan Aplikasi LAPAK di Desa Ambulu Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dalam pemberian pelayanan mengenai infrastruktur sudah cukup memadai dalam menunjang kinerja pegawai di Desa Ambulu Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Namun demikian, untuk infrastruktur khususnya komputer yang diperuntukkan untuk melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan sudah mumpuni meskipun masih ada kendala ketika adanya pemadaman listrik. Ketika sudah terjadi pemadaman listrik semua akses pelayanan tidak bisa dijalankan. Internet untuk menunjang berjalannya inovasi tersebut sudah tersedia.

4. Dukungan Pemerintah

Ketersediaan dan konsistensi anggaran ini merupakan dukungan yang besar untuk dapat mengembangkan *e-government* yang sudah diterapkan. Oleh karena itu dukungan pemerintah menduduki peran yang sangat penting jika dukungan pemerintah tidak diberikan maka dipastikan *e-government* juga tidak akan berjalan dengan mulus.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penerapan LAPAK di Desa Ambulu Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dalam pemberian pelayanan mengenai dukungan pemerintah pada umumnya sudah baik terkait penyediaan anggaran dalam bidang penerapan dan pengembangan LAPAK di Desa Ambulu Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo sudah memenuhi.

7. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahsan dalam penerapan aplikasi layanan cepat administrasi kependudukan (lapak) guna menunjang optimalisasi pelayanan publik di Desa Ambulu Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo mengacu pada indikator-indikator penelitian yaitu aspek penunjang keberhasilan inovasi aplikasi LAPAK, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam penerapan Aplikasi LAPAK dalam pemberian pelayanan dalam mengenai partisipasi masyarakat sudah terbilang baik. Meskipun masih ada masyarakat Desa yang belum paham akan inovasi aplikasi LAPAK tersebut. LAPAK ini yang menjalankan yaitu staf pelayanan yang mengurus aplikasi LAPAK.
2. Pada penempatan sumberdaya manusianya, masih terlihat kurangnya persiapan sumberdaya manusia yang mengelola Aplikasi LAPAK tersebut. Hal tersebut terlihat hanya ditangani ada 2 staf yang melayani administrasi kependudukan dengan menggunakan Aplikasi LAPAK. Sehingga masih terlihat masyarakat antri pada saat melakukan pelayanan administrasi kependudukan. Disini untuk melakukan pelayanan administrasi tidak hanya bisa dilakukan di kantor desa saja dirumah staf pelayanan juga bisa dilakukan pelayanan administrasi kependudukan. Staf pelayanan yang menjalankan aplikasi LAPAK tersebut sudah mendapatkan pengajaran dan sudah

melakukan bimtek sebagai penguatan untuk melaksanakan suatu inovasi pelayanan tersebut.

3. Pada bidang infrastruktur sudah cukup memadai dalam menunjang kinerja pegawai di Desa Ambulu Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Namun demikian, untuk infrastruktur khususnya komputer yang diperuntukkan untuk melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan sudah mumpuni meskipun masih ada kendala ketika adanya pemadaman listrik. Ketika sudah terjadi pemadaman listrik semua akses pelayanan tidak bisa dijalankan. Internet untuk menunjang berjalannya inovasi tersebut sudah tersedia.
4. Pada tahap dukungan pemerintah ini, LAPAK di Desa Ambulu Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dalam pemberian pelayanan mengenai dukungan pemerintah pada umumnya sudah baik terkait penyediaan anggaran dalam bidang penerapan dan pengembangan LAPAK di Desa Ambulu Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo sudah memenuhi.

8. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disimpulkan diatas dalam Penerapan Aplikasi Layanan Cepat Administrasi Kependudukan (LAPAK) guna menunjang optimalisasi pelayanan publik di Desa Ambulu Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut

1. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat diadakan sosialisasi yang dilaksanakan sebisa mungkin dikemas secara menarik agar masyarakat lebih mudah memahami inovasi aplikasi LAPAK tersebut sehingga bisa ikut

berpartisipasi mensukseskan aplikasi LAPAK ini.

2. Pada penempatan sumber daya manusia, hendaknya ditambah lagi staf untuk menangani berjalannya pelayanan administrasi kependudukan yang mana menggunakan aplikasi LAPAK sehingga dapat berjalan dengan tepat dan cepat sehingga masyarakat tidak antri panjang.
3. Penyediaan infrastruktur khususnya ketika terjadi pemadaman listrik sehingga pelayanan dihentikan itu perlu tingkat lagi. Hendaknya disediakan jenset di kantor Desa Ambulu sebagai penunjang untuk melakukan suatu kegiatan pelayanan.
4. Perlu ditingkatkan lagi dukungan dari pemerintahan terkait dengan penyediaan anggaran sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik, cepat dan tepat.

9. DAFTAR PUSTAKA

- Indrajit, Richardus Eko. 2006. *Electronic Government*. Yogyakarta: Andi.
- Oktavya, Ayu Aditya. 2015. Penerapan (*Electronic Government*) *e-Government* Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dalam Pemberian Pelayanan di Kota Bontang. Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman
- Pascarani, Ni Nyoman Dewi et al. Implementasi Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Pemerintah Provinsi Bali). Bali: FISIP Universitas Udayana.
- Inpres No. 3 Tajun 2003 Tentang Pengembangan *E-Government* di *Indonsia*.

Matches

Internet sources

18

1	http://staff.unila.ac.id/artefaksi/files/2015/06/ipi73037.pdf	6 Sources	3.45%
2	http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/semnasif/article/download/759/639		1.65%
3	https://nofalliaata.wordpress.com/sosial-budaya/pelayanan-masyarakat-dalam-lembaga-pemerintah-2	6 Sources	1.55%
4	http://eprints.umm.ac.id/37514/3/jiptumpp-gdl-sitikomsat-50985-3-babii.pdf		1.44%
5	https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/download/1449/1024		0.72%
6	https://ecojoin.org/index.php/EJE/article/download/624/605	2 Sources	0.58%
7	http://repository.its.ac.id/48853/1/3111100030-Undergraduate-Theses.pdf		0.29%